KECAMATAN

# PENAJAM

# RENSTRA

## RENCANA KERJA STRATEGIS

## TAHUN 2024 - 2026

KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA

# KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Penajam Tahun 2024–2026 ini dapat tersusun dengan baik. Sebagaimana diketahui untuk tercapainya prioritas Pembangunan daerah, tujuan maupun sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Penajam Tahun 2024-2026, maka perlu perencanaan strategi, kebijakan,program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Penajam guna mewujudkan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Agile (gesit), Adaptif dan Kolaboratif.

Salah satu upaya ke arah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Penajam dalam jangka waktu empat tahunan yang bersifat indikatif. Renstra Kecamatan Penajam memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Penajam Tahun 2024-2026. Renstra Kecamatan Penajam Tahun 2024-2026 disusun guna menyediakan suatu tolok ukur dengan memperhatikan indikator dan sasaran kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Akhirnya dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Penajam Tahun 2024-2026 dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Penajam selama masa tiga tahun ke depan.

Camat Penajam

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Kahar Mashud, SH
Nip. 19730118 200604 1 003

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur.

Guna mengoperasionalkan program yang ada dalam RPJMD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara menyusun rencana strategis (Renstra) SKPD untuk menindak lanjuti program RPJMD kedalam program dan kegiatan SKPD selama lima tahun. Program dan kegiatan dalam renstra SKPD terkait dengan sasaran RPJMD, dengan demikian renstra SKPD tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Kecamatan Penajam sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai tugas pokok.melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam penyelenggaraanpemerintahan di tingkat Kecamatan, tujuan yang akan dicapai harus sesuai dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Penajam Paser Utara (RPJMD) 2024-2026 yaitu :**“Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang Maju, Modern dan Religius”.**

Program RPJMD yang termasuk bidang urusan lingkup Kecamatan Penajam perlu dituangkan kedalam kegiatan-kegiatan yang kemudian di tuangkan menjadi visi Kecamatan Penajam dalam Rencana strategis Kecamatan Penajam. Penyusunan kegiatan memperhatikan kedudukan dalam urusan pemerintahan, evaluasi kegiatan RPJMD sebelumnya, proyeksi lima tahun ke depan, skala prioritas dan memperhitungkan sumber daya yang

tersedia. Sehingga rencana strategis Kecamatan Penajam tahun 2024-2026 yang dirumuskan dapat dilaksanakan secara efesien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan.

Penyusunan Rencana strategis Kecamatan Penajam mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 Tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah melalui keterlibatan semua pemangku kepentingan.

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Penajam adalah sebagai salah satu dokumen perencanaan untuk periode lima tahunan, yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Penajam dan menjadi masukan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (RKPD).

Kecamatan Penajam mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan pemerintahan di tataran Kecamatan dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kecamatan Penajam mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penetapan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Penajam berdasarkan RPJMD Pemerintah Daerah, tugas, permasalahan dan kebijaksanaan yang ada;
b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. pendistribusian tugas kepada Sekretaris, Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Pelayanan Umum, Kepala Seksi Pertanahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;

e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Organisasi Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;

f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Kecamatan Penajam dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di Kecamatan Penajam;

g. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan /atau kelurahan;

h. penandatanganan naskah dinas berdasarkan kewenangannya sebagai kepala Kecamatan Penajam untuk keabsahan naskah dinas;

i. penjalinan kerja sama dengan instansi lain atau mitra kerja untuk keberhasilan program kerja Kecamatan Penajam;

j. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan kepada Sekretaris, Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Pelayanan Umum, Kepala Seksi Pertanahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan bawahan lain pada Kecamatan Penajam sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

k. pengevaluasian pelaksanaan program Sekretaris, Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Pelayanan Umum, Kepala Seksi Pertanahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;

l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan; pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Untuk mewujudkan pemerintahan tingkat Kecamatan yang implementatif dan visioner maka perlu dipersiapkan suatudokumen perencanaan yang bersifat komprehensif mencakup arah dan kebijakanyang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan, Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Renstra SKPD dapat disebut juga sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis.

Substansi Renstra Kecamatan Penajam memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Penajam serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara yang bersifat indikatif. Makna indikatif dalam konteks ini, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah informasi tentang sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana strategis hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan fleksibel.

Renstra Kecamatan Penajam merupakan penjabaran visi dan misi Kecamatan Penajam dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana telah dituangkan dalam RPJMD 2024-2026. Selain itu Renstra Kecamatan Penajam harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya.

Hubungan renstra Kecamatan Penajam dengan dokumen lainnya dapat dilihat pada gambar I.1 dan I.2

Gambar 1.1 : Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

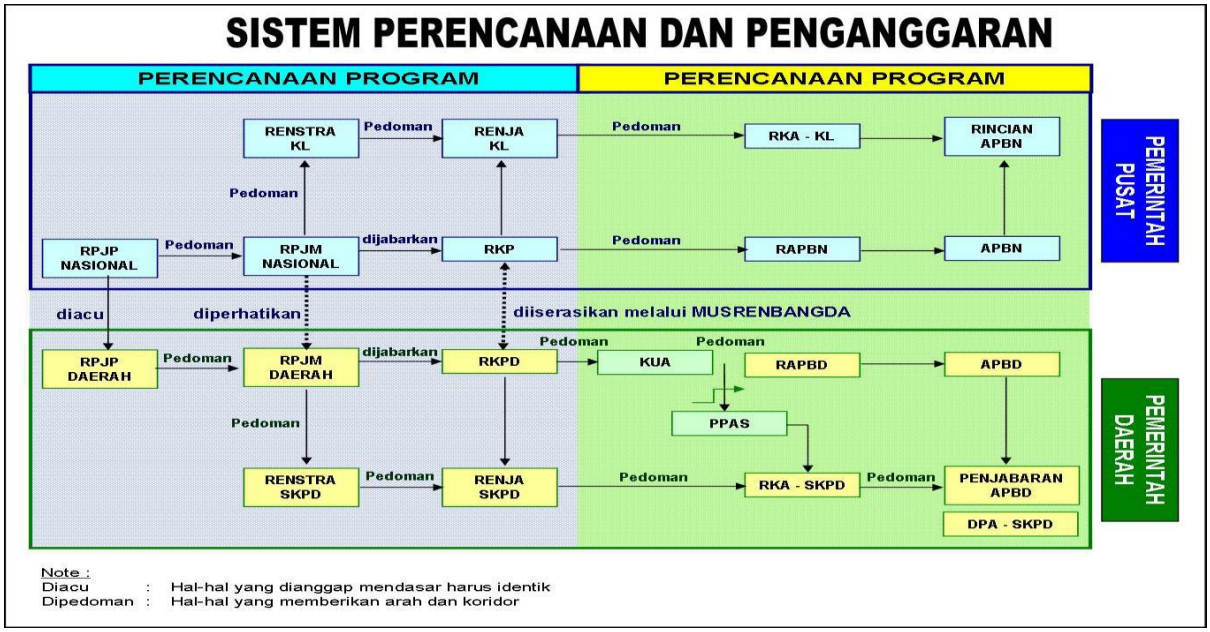


Gambar 1.2 : Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

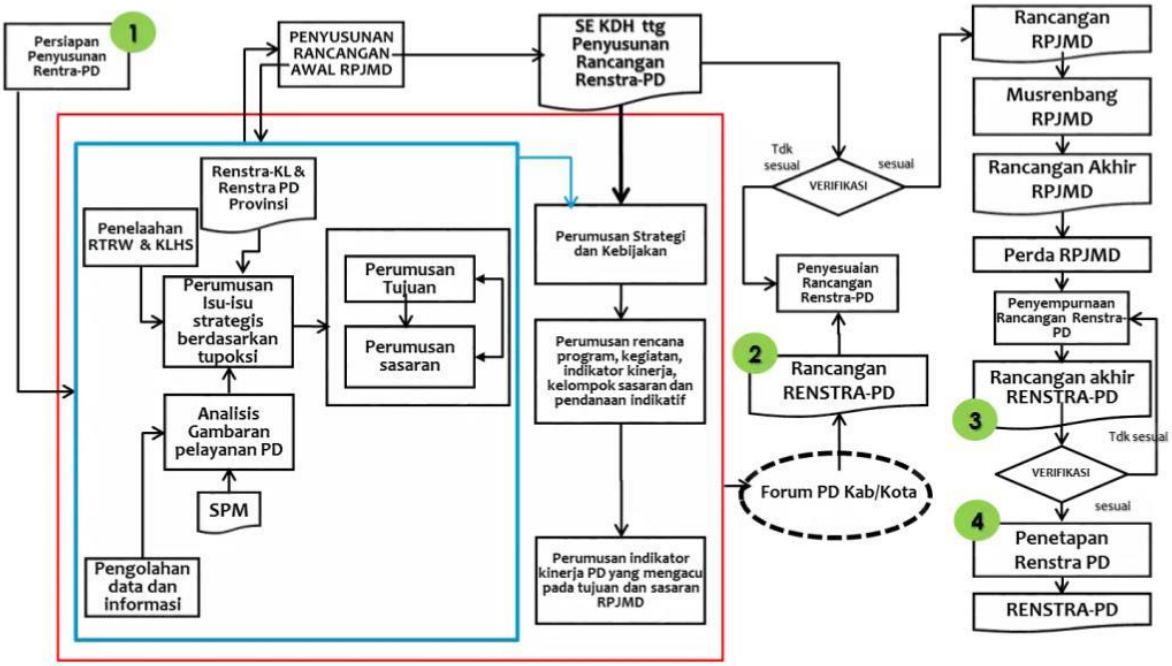

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026 berlandaskan kepada beberapa ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentangPengelolaanKeuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

13. PeraturanPemerintahNomor 38 Tahun 2007 tentangPembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota;
14. PeraturanPemerintahNomor 41 tahun 2007 tentangOrganisasiPerangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan, Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
20. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara.
22. Peraturan Daerah KabupatenPenajamPaser Utara Nomor 01 Tahun 2012 TentangRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah Tahun 2005 – 2025

23. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara NomorTahun 2019TentangRencana Pembangunan Jangkamenengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 – 2026.
24. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentangSusunan Organisasi, Tata Kerja, TugasPokokdan Fungsi Kecamatan Penajam.
25. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Penajam.

## 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan PenajamTahun 2024-2026 adalah:

1. Untuk mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Penajam Paser Utara (RPJMD) Tahun 2024 – 2026 ;
2. Untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Penajam dalam rangka mendukung Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional;
3. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya;
4. Untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehinggatujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2024 – 2026 dapat tercapai;
5. Menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dan acuan resmi bagi Kecamatan Penajam dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dalam mencapai tujuan pembangunan;
6. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
7. Untuk mensinergikan seluruh kemampuan dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam menjawab tuntutan perkembangan pembangunan berdasarkan tatanan regional, nasional maupun global.

Tujuan penyusunan Renstra adalah :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Kecamatan Penajam dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan;
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Penajam untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Penajam untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Kecamatan Penajam;
5. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan;
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

## 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis Kecamatan Penajam ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PENAJAM**

Bab ini berisi gambaran umum pelayanan Kecamatan Penajam yaitu meliputi tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Penajam, sumberdaya Kecamatan Penajam, kinerja Pelayanan Kecamatan Penajam, tantangan dan peluang pembangunan dan pelayanan Kecamatan Penajam**.**

**BAB III :PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PENAJAM**

Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Penajam, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan renstra, serta penentuan isu-isu strategis.

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Berisi visi dan misi Kecamatan Penajam, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Penajam, strategi dan kebijakan.

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berisi strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berisi rumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berisi indikator kinerja perangkat daerah secara langsung yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang

**BAB VIII : PENUTUP**

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PENAJAM

## 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Penajam

### 2.1.1. Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi,Tata Kerja,Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam PaserUtara, Bahwa Kecamatan Penajam mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Camat Penajam mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penetapan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Penajam berdasarkan RPJMD Pemerintah Daerah, tugas, permasalahan dan kebijaksanaan yang ada;

b. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan kebijaksanaan pada Kecamatan Penajam;

c. perumusan pedoman kerja Kecamatan Penajam sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;

d. pendistribusian tugas kepada Sekretaris, Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Pelayanan Umum, Kepala Seksi Pertanahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;

e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Organisasi Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;

f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Kecamatan Penajam dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan urusan

otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di Kecamatan Penajam;

g. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pada Kecamatan Penajam dengan Organisasi Perangkat Daerah lain;
h. penandatanganan naskah dinas berdasarkan kewenangannya sebagai kepala Kecamatan Penajam untuk keabsahan naskah dinas;
i. penjalinan kerja sama dengan instansi lain atau mitra kerja untuk keberhasilan program kerja Kecamatan Penajam;
j. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan kepada Sekretaris, Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Pelayanan Umum, Kepala Seksi Pertanahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan bawahan lain pada Kecamatan Penajam sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
k. pengevaluasian pelaksanaan program Sekretaris, Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Pelayanan Umum, Kepala Seksi Pertanahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

### 2..1.2. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugasnya Camat dibantu oleh seorang sekretaris, 2 kepala sub bagian dan 5 (Lima) orang Kepala Seksi sebagaimana gambar dibawah ini:

Gambar. 2.1.3 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN PENAJAM

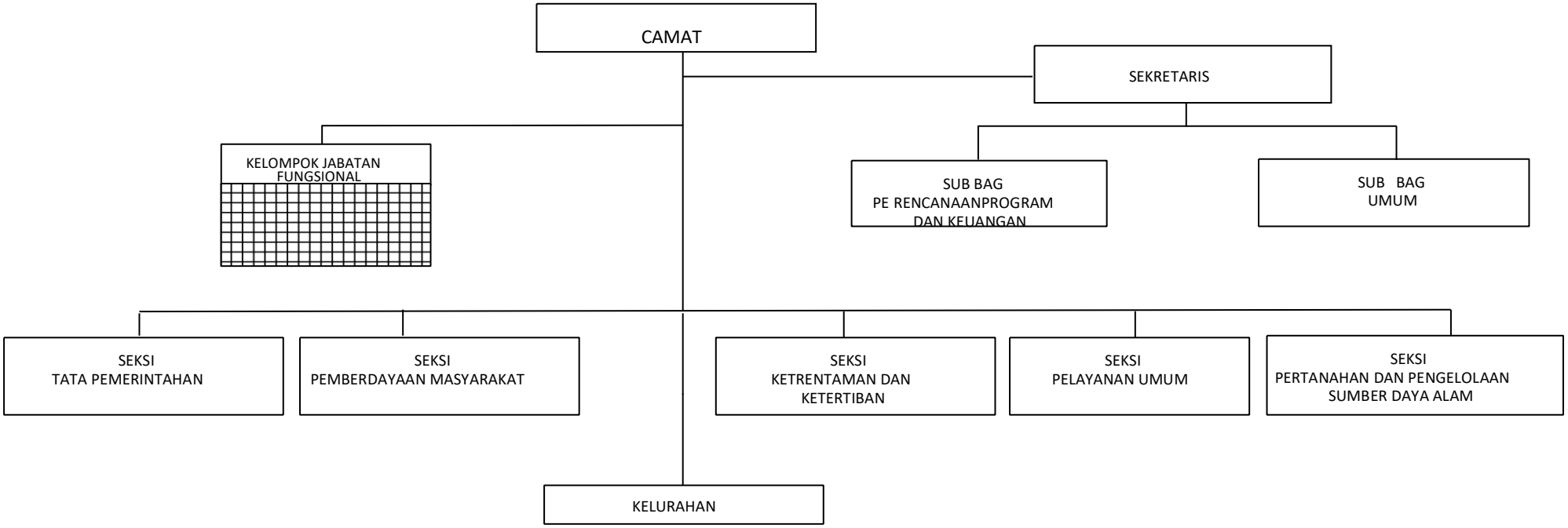

### 2.1.3.Tugas dan Fungsi

Kecamatan Penajam berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Selanjutnya tugas pokokdan fungsi dan struktur Organisasi sebagai berikut :

1. **Camat**

(1) Kecamatan Penajam dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan dan penetapan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Penajam berdasarkan RPJMD Pemerintah Daerah, tugas, permasalahan dan kebijaksanaan yang ada;
b. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan kebijaksanaan pada Kecamatan Penajam;
c. perumusan pedoman kerja Kecamatan Penajam sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
d. pendistribusian tugas kepada Sekretaris, Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Pelayanan Umum, Kepala Seksi Pertanahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Organisasi Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Kecamatan Penajam dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan urusan otonomi daerah dan

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di Kecamatan Penajam;

g. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pada Kecamatan Penajam dengan Organisasi Perangkat Daerah lain;
h. penandatanganan naskah dinas berdasarkan kewenangannya sebagai kepala Kecamatan Penajam untuk keabsahan naskah dinas;
i. penjalinan kerja sama dengan instansi lain atau mitra kerja untuk keberhasilan program kerja Kecamatan Penajam;
j. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan kepada Sekretaris, Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Pelayanan Umum, Kepala Seksi Pertanahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan bawahan lain pada Kecamatan Waru sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
k. pengevaluasian pelaksanaan program Sekretaris, Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Pelayanan Umum, Kepala Seksi Pertanahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

**2. Sekretariat Kecamatan**

(1) Sekretariat Kecamatan Penajam dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

(2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam memimpin, merencanakan,melaksanakan, mengkoordinasikan kegaiatan pelayanan dan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, informasi kehumasan dan ketatausahaan serta melaksanakan

tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan dan penyiapan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Penajam berdasarkan usulan Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pelayanan Umum, dan Seksi Pertanahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam serta kesekretariatan dan skala prioritas untuk kemudian ditetapkan oleh Camat;

b. penyusunan dan penyiapan Rencana Kerja Tahunan yang berisikan Upaya Peningkatan dan pengembangan Kebijaksanaan pada Kecamatan Penajam;

c. penyusunan dan penyiapan pedoman kerja Kecamatan Penajam sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;

d. pendistribusian tugas kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Umum berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;

e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Sekretariat Organisasi Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;

f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Kecamatan Penajam dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi umum serta kepegawaian;

g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Umum sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

h. pengevaluasian pelaksanaan program pada kesekretariatan Kecamatan Penajam berdasarkan rencana dan realisasinya

untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;

i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan;

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Sekretariat Kecamatan Penajam, membawahkan:

a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

**1. Sub Bagian Program dan Keuangan**

(1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

(2) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan Penajam serta pengelolaan laporan keuangan Kecamatan Penajam.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sebagai bahan penyusunan DPA;

b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;

c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;

d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;

e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;

f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Program dan Keuangan;

g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;

i. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Sekretaris;

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

**2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

(1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

(2) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai pokok merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapaan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bagian Umum sebagai bahan penyusunan DPA;

b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;

c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum;

d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bagian Umum;

e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bagian Umum;

f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum dan Administrasi Kepegawaian;

g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Sub Bagian Umum Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

h.pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;

i. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Sekretaris;

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

**3. Seksi Tata Pemerintahan**

(1) Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

(2) Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum dan perundang-undangan, perimbangan keuangan daerah dan fasilitasi penyelenggaraan desa/kelurahan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Tata Pemerintahan sebagai bahan penyusunan DPA;

b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;

c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Tata Pemerintahan;

d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Tata Pemerintahan;

e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Tata Pemerintahan;

f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, organisasi kemasyarakatan di desa dan/atau kelurahan serta pengembangan otonomi daerah;

g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Tata Pemerintahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

i. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya

j. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Tata Pemerintahan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Camat;

k.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial**

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kecamatan Waru dibidang Kesejahteraan Sosial.

(2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebagai bahan penyusunan DPA;

b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;

c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;

i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Camat;

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

(2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai bahan penyusunan DPA;

b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis OrganisasiPerangkat Daerah;

c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait, fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan

masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;

g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;

i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Camat;

j. mengkoordinir Satuan Polisi Pamong Praja tingkat Kecamatan Penajam.

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

**6. Seksi Pelayanan Umum**

(1) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

(2) Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang pelayanan umum.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Pelayanan Umum sebagai bahan penyusunan DPA;

b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan

penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;

c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum;

d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Pelayanan Umum;

e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Pelayanan Umum;

f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan (PATEN), surat-surat keterangan,surat hutang pada bank, pendaftaran pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu tanda Penduduk (KTP) serta surat keterangan yang dibutuhkan oleh masyarakat;

g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Pelayanan Umum sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;

i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Camat;

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

**7. Seksi Kesejahteraan Sosial**

(1) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

(2) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang Kesejahteraan Sosial.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan penyusunan DPA;

b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;

c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kesejahteraan Sosial;

d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Kesejahteraan Sosial;

e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Kesejahteraan Sosial;

f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan bantuan untuk kesejahteraan sosial kelurahan dan desa, kegiatan kemasyarakatan serta pembangunan fisik dan nonfisik;

g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan Seksi Kesejahteraan Sosial sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;

i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Camat;

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## 2.2 Sumberdaya Kecamatan Penajam

### 2.2.1. Personalia

Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara per 31 Agustus 2023 memiliki Sumber Daya Aparatur Daerah (SDAD) Sebanyak 31 orang. Dari jumlah tersebut sebnyak 7 orang merupakan pejabat struktural sedangkan sisanya sebanyak 14 orang merupakan staf pelaksana dan 1

orang bendahara, 33 orang merupakan Tenaga Harian Lepas (THL) Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya pegawai, jumlah SDAD tersebut belum memadai untuk kebutuhan khususnya staf pelaksana Pegawai Negeri Sipil, sedangkan ditinjau dari kualitas dan tingkat pendidikan, juga masih blom memadai untuk kebutuhan yang ada dan perlu peningkatan pengembangan wawasan dan keterampilan dengan mengikut sertakan staf pada diklat dimasa yang akan datang.

Rincian secara lengkap SDAD yang dimiliki Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat sebagai berikut;

**Tabel 2.1 Perincian Golongan dan Ruang**

| NO | URAIAN | Golongan/ruang | | | | | | | | | | | | | | | | PENDIDIKAN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IV | | | | III | | | | II | | | | I | | | | S2 | S1 | Diii | Di | SMU | SLTP | SD |
| | | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | | | | | | | |
| 1 | STRUKTURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Camat | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | Sekretaris Camat | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | Kepala Seksi PPSDA | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | Kepala Seksi PMD & Kessos | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | Kepala Seksi Transib | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | Kepala Sub | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bagian Umum dan Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pegawai Non Struktural/Staf | | | | | | 2 | 2 | 1 | | | | 4 | | | | | | | 2 | | 4 | | |
| | Sub Jumlah | - | - | - | - | - | **2** | **3** | **6** | **-** | **-** | **-** | **4** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6** | **3** | **-** | **4** | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | THL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 3 | | 19 | | 2 |
| | Sub Jumlah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **9** | **3** | **-** | **19** | **-** | **2** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **JUMLAH** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2** | **3** | **6** | **-** | **-** | **-** | **4** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **15** | **6** | **-** | **23** | **-** | **2** |

### 2.2.2. Aset

Ketersediaan sarana dan fasilitas juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, di samping sumberdaya manusia yang profesional. Kecamatan Penajam dilengkapi sarana dan fasilitas yang diharapkan mampu mendukung

Tabel 2.2

Daftar Sarana dan Prasarana

| NO | SARANA & PRASARANA | JUMLAH | SATUAN |
|---|---|---|---|
| I | SARANA : | | |
| | Luas Tanah | - | |
| | Lua Bangunan Kantor | 300 | $M^2$ |
| II | PRASARANA | | |
| | Kendaraan Roda 4 (Double Cabin) | 1 | Unit |
| | Kendaraan Roda 4 | 2 | Unit |
| | Kendaraan Roda 2 | 7 | Unit |
| | P.C Unit | 15 | Unit |
| | Laptop | 6 | Unit |
| | Printer | 16 | Unit |
| | A.C. Split | 8 | Unit |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Alat Pemadam/Portable | 5 | Unit |
| | Alat Penghancur Kertas | 1 | Unit |
| | Brandkas | 1 | Unit |
| | Camera | 1 | Unit |
| | Dispenser | 2 | Unit |
| | Filing Cabinet Besi | 4 | Unit |
| | GPS | 1 | Unit |
| | Kipas Angin | 1 | Unit |
| | Kursi Besi/Metal | 138 | Unit |
| | Kursi Pejabat | 8 | Unit |
| | Kursi Tamu | 1 | Unit |
| | Lemari Es | 2 | Unit |
| | Lemari Kayu | 12 | Unit |
| | Loudspeaker | 2 | Unit |
| | Mainframe | 1 | Unit |
| | Meja Kerja Kayu | 9 | Unit |
| | Meja Kerja | 11 | Unit |
| | Meja Kerja Pejabat | 8 | Unit |
| | Meja Rapat | 1 | Unit |
| | Mesin Absensi | 1 | Unit |
| | Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) | 4 | Unit |
| | Microphone/Wireless MIC | 1 | Unit |
| | Partisi | 3 | Set |
| | Pesawat Telephone | 1 | Unit |
| | Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) | 3 | Unit |
| | Sofa | 6 | Unit |
| | Tenda | 5 | Unit |
| | Televisi | 2 | Unit |

## 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Penajam

### 2.3.1. Kondisi Umum Pelayanan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja,Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, Kecamatan Penajam merupakan unsur perwakilan pemerintah daerah di tingkat Kecamatan, secara garis besar kondisi umum pelayanan di Kecamatan Penajam sudah menunjukkan kualitas pelayanan yang baik meskipun masih perlu terus dilakukakan perbaikan.

### 2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dalam melaksanakan pelayanan Kecamatan Penajam, Pencapaian tarrget kinerja layanan tersebut didukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut. Kinerja pelayanan Kecamatan Penajam dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Penajam

| | Indikator | Base Line data 2023 | Target Renstra | Rasio | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kegiatan Perencanaan Program dan Keuangan** | | | | |
| 1 | Persentase SPJ yang masuk dan dapat diproses pembayaran | 90% | 98% | 98% | |
| 2 | Persentase laporan yang dikirim tepat waktu | 95% | 95% | 95% | |
| 3 | Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | |
| 4 | Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas | 90% | 90% | 90% | |
| | **Pelayanan Umum dan Kepegawaian** | | | | |
| 5 | Persentase waktu pelayanan surat masuk dan keluar yang dapat diproses sesuai dengan tujuan berdasarkan SOP | 95% | 95% | 95% | |
| 6 | Persentase usulan kenaikan pangkat yang diproses tepat waktu | 95% | 95% | 95% | |
| 7 | Persentase usulan pensiun yang diproses tepat waktu | 98% | 98% | 98% | |
| 8 | Persentase usulan kenaikangaji berkala yang diproses tepat waktu | 95% | 95% | 95% | |
| 9 | Persentase kehadiran pegawai pada apel pagi dan sore yang tepat waktu | 95% | 95% | 95% | |
| 10 | Persentase barang milik daerah yang dipelihara dengan baik | 80% | 80% | 80% | |
| | **Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | | | | |
| 11 | Terciptanya Kegiatan dan ketertiban wilayah Kecamatan Penajam | 19 kelurahan 4 Desa | 19 Kelurahan 4 desa | 100% | |
| 12 | Laporan kegiatan Patroli Penegakan Perda Terkait Pajak Retribusi Daerah | 1 dokumen | 1dokumen | 100% | |
| 13 | Jumlah surat ijin Keramaian | 100 dokumen | 120 dokumen | 100% | |
| 14 | Jumlah SKCK ( Surat ijin catatan kepolisian) | 650 dokumen | 680 dokumen | 100% | |
| | **Pelayanan Umum** | | | | |
| | Terlaksananya Peningkatan | 60 | 100 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Pelayanan<br>Masyarakat<br>Bidang Perizinan<br>- IMB<br>-IG(ijin gangguan)<br>- SIUP (surat ijin usaha perdangan)<br>Bidang Non<br>Perizinan<br>- SKTM (Surat Keterangan tidak mampu)<br>- Surat pindah<br>- Legalisir<br>- Dispensasi Nikah<br>- Izin keramaian<br>- SKCK (surat izin Catatan kepolisian)<br>- Ahli waris<br>- Keterangan Domisili<br>- Surat pindah Datang<br>- Surat pindah antar Kelurahan<br>- Rekomendasi Proposal<br>- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | dokumen<br>70<br>Dokumen<br>97<br>Dokumen<br><br>331<br>Dokumen<br>393<br>Dokumen<br>300<br>Dokumen<br>400<br>Dokumen<br>300<br>Dokumen<br>650<br>Dokumen<br>114<br>Dokumen<br>197<br>Dokumen<br>378<br>Dokumen<br>339<br>Dokumen<br>40<br>Dokumen<br>40% | Dokumen<br>100<br>Dokumen<br>5 dokumen<br><br>350<br>Dokumen<br>400<br>Dokumen<br>335<br>Dokumen<br>425<br>Dokumen<br>320<br>Dokumen<br>680<br>Dokumen<br>135<br>Dokumen<br>150<br>Dokumen<br>400<br>Dokumen<br>345<br>Dokumen<br>50<br>Dokumen<br>85% | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>85% | |
| | **Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat** | | | | |
| 16 | Laporan Kegiatan Musrembang | 1<br>dokumen | 1<br>dokumen | 100% | |
| 17 | Laporan Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | |
| | Laporan Kegiatan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kesejahteraan | 1 | 1 | 100% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Keluarga (PKK) | Dokumen | Dokumen | | |
| 19 | Jumlah SKTM (surat keterangan tidak mampu) | 535 dokumen | 550 dokumen | 100% | |
| 20 | Jumlah surat dispensasi nikah | 300 Dokumen | 325 Dokumen | 100% | |
| 21 | Jumlah surat Rekomendasi Proposal | 40 Dokumen | 50 dokumen | 100% | |
| | **Pelayanan Tata Pemerintah** | | | | |
| 22 | Jumlah Propil Desa | 1 Dokumen | 1 dokumen | 100% | |
| 23 | Monitoring dan Evaluasi pelaksanaa ADD | 1 Kegiatan | 1 kegiatan | 100% | |
| 24 | Pendampingan Dana Desa APBN | 1 Kegiatan | 1 kegiatan | 100% | |
| 25 | Jumlah surat pindah | 393 Dokumen | 400 dokumen | 100% | |
| 26 | Jumlah legalisir | 400 Dokumen | 425 dokumen | 100% | |
| 27 | Jumlah surat keterangan ahli waris | 114 Dokumen | 135 Dokumen | 100% | |
| 28 | Jumlah surat keterangan domisili | 10 Dokumen | 15 dokumen | 100% | |
| 29 | Jumlah surat pindah datang | 378 dokumen | 400 dokumen | 100% | |
| 30 | Jumlah surat pindah antar kelurahan desa | 339 dokumen | 345 dokumen | 100% | |
| 31 | Terlaksananya peringatan hari kemerdekaan RI | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | |
| | **Pelayanan Pertanahan dan pengelolaan sumber daya alam** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Laporan penyelesaian sengketa dan konflik perkara pertanahan | 8 Dokumen | 8 dokumen | 100% | |
| 33 | Jumlah Surat Kepemilikan Tanah(SKT) | 338 dokumen | 420 dokumen | 100% | |
| | Jumlah Surat Keterangan Pelepasan Hak | 7 dokumen | 10 dokumen | 100% | |
| | | | | | |

## 2.4. Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Penajam

Eksistensi Kecamatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yangmempunyai tugas dan fungsi sebagai perwakilan pemerintah kabupaten di tingkat kecamatan memilikiperan yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan.

Namun demikian, masih adanya tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Penajam dalam halpembangunan daerah yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian target Pembangunan nasional.

Untuk lebih memudahkan pencapaian keberhasilan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, maka diperlukan faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) untuk menetapkan faktor kunci keberhasilan tersebut perlu adanya Analisa Lingkungan Internal (ALI) maupun eksternal (ALE) dengan pendekatan SWOT (strengths, Weakness, Oppurtunities, Treats). Untuk lebih memudahkan pencapaian keberhasilan tugas Kecamatan Penajam Kabupaten Penajan Paser Utara, maka diperlukan faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Faktor)

Strategi dirancang melalui analisa lingkungan internal dan eksternal, dengan mempertimbangkan nilai luhur sebagai berikut :

1 . Kerja sama

2 . Keberhasilan

3 . Kepastian Masa Depan

Analisas Limgkungan Internal (ALI) terdiri atas kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weaknesses), sedangkan Analisa Lingkungan Eksternal (ALE) terdiri dari peluang (Oppurtunities) dan ancaman (Threats).

**a. Kekuatan**

- Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati No.52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara

- Komitmen Pimpinan yang kuat untuk peningkatan yang lebih baik
- Sumber Daya manusia yang memadai
- Koordinasi yang baik dengan masyarakat atau perangkat Desa/Kelurahan
- Tersediannya dana dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang memadai

**b. Kelemahan**

1. Kualitas SDM yang tersedia belum memenuhi standar kompetensi yang di persyaratkan
2. Belum tersedianya data Potensi Kecamatan Penajam yang Akurat dan Komprehenshif
3. Data dan informasi pembangunan Kecamatan Belum Tersedia secara Akurat dan Komprehensif
4. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD terkait

**C. Peluang**

Peluang yang berasal dari lingkungan eksternal dan terindentifikasi dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan penajam Kabupaten Penajam Paser Utara yang memberikan mandat dan wewenang yang jelas kepada Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Untuk berkiprah lebih maksimal
- Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang diterapkan sehingga semakin leluasa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari pertisipasi public.
- Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program.
- Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik itu yang bersifat pertisipatif/ swadaya masyarakat maupun keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.
- Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif.
- Adanya kemungkinan keterbukaan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Propinsi, Pemerintahan Kota/Kabupaten lain, Swasta, Lembaga Donor, LSM, dan Lembaga-Lembaga lainnya

**d. Ancaman**

- Regulasi yang berubah – ubah
- Sisitem informasi yang belum efektif
- Kompleksitas kepentingan masyarakat yang begitu tinggi
- Masih adanya ego sectoral

# BAB III
# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PENAJAM

## 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kecamatan Penajam merupakan lembaga perrwakilan pemerintah Kabupaten di tingkatan Kecamatan, yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten sehingga pembangunan wilayah dapat secara menyeluruh. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Penajam yaitu menerima pelimpahan sebagian wewenang bupat iuntuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penyelenggaraan pemerintah kecamatan dalam hal ini pelayanan publik dituntut dapat mewujudkan pelayanan yang baik, cepat, tepat dan akurat. Secara umum kualitas pelayanan dikecamatan penajam masih belum dapat dikatakan baik dan optimal. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor dan permasalahan yaitu:

a. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia;
b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana;
c. Semakin tingginya tuntutan masyarakat tentang pelayanan yang cepat dan sistem pelayanan yang belum bisa dilaksanakan secara optimal;
d. Terbatasnya kewenangan yang dilimpahkan kekecamatan.

Berdasarkan kondisi objektif yang dipaparkan diatas, Kapasitas Kecamatan Penajam sebagai lembaga pemerintah ditingkat Kecamatan perlu diperkuat agar dapat memaksimalkan berjalanannya pemerintahan secara baik. Hal tersebut dapat dilihat pada table 3.1 dibawah ini

## 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

### 3.2.1 Visi

Visi Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018-2023 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang Maju, Modern dan Religius”**yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Penajam Paser Utara, penjabaran arti dari visi tersebut antara lain:

**MAJU:**

Meningkatkatnya kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.

**MODERN :**

Mampu dan setara dalam menerapkan dan mensenergikan prinsip-prinsip tatakelola pemerintah dan pelayanan masyarakat dengan kemajuan teknologi kekinian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

**RELIGIUS :**

Mewujudkan kehidupan masyarakat sejajar, sederajat dan seimbang dunia & akhirat menuju masyarakat berakhlak mulia, aman dan damai serta hidup berdampingan antara sesama pemeluk agama dilandaskan Lakumdinukum Waliyadin dan Pancasila

MEMBANGUN PPU MAJU, MODERN DAN RELIGIUS

| MISI | URAIAN |
|---|---|
| 1 | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran |
| 2 | Pembangunan infrastruktur& konektivitas kawasan serta industri terpadu |
| 3 | Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan |
| 4 | Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalan arti luas |
| 5 | Mengakselerasi laju mesin-masinpertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdangangandan jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan |
| 6 | Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, Perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat monoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunankawasan perdesaan dan kelurahan |

| | |
|---|---|
| 7 | Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta pemukiman. |
| 8 | Peningkatan Penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas |
| 9 | Menguatkan kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintah yang baik dan berkualitas |
| 10 | Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintah dan ekonomi daerah |
| 11 | Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan senergitas untuk pembangunan menuju masyarakat penajam paser utara yang maju, modern dan religius. |

Analisis visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih selanjutnya diturunkan menjadi program kegiatan di Kecamatan Penajam.

Dalam pencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih, Kecamatan Penajam mengacu kepala beberapa *misi yaitu :*

1. Misi 6 : Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggir, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan
2. Misi 7 : Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan jembatan, pelabuhan, energy listrik, pengolahan sumber daya air, pengolahan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman
3. Misi 9 : Menguatkan kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas
4. Misi 11 : Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat penajam paser utara yang maju, modern, dan religius

Adapun tujuan sasaran dan Strategi RPJMD yang akan dicapai oleh Kecamatan Penajam beserta Faktor Pendorong dan Penghambat adalah sebagai berikut :

## 3.3 Telaahan Renstra Kecamatan Penajam

Sebagaimana telah diamanatkan dalam permendagri 86 tahun 2017 tentangTentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan, Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu disinkronisasi baik dari dokumen perencanaan sebelumnya dan perencanaan yang akan disusun.

Mencermati hasil sasaran dan kebijakan pada Renstra Kecamatan dimana terdapat 4 misi diantaranya :

1. Pengembangan ekonomi kerakyatan
2. Menguatkan kelembagaan dan sumberdaya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkwalitas
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
4. Meningkatkan kerukunan antarumat beragama melalui Sberbagai forum dialog sosial maupun ekonomi

## 3.4 TelaahanTerhadap RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara

Dalamfungsiwilayah**,** Kecamatan Penajam merupa kan bagian dari wilayah Kabupaten Penajam Passer Utara dan merupa kan salah satu pusat pertumbuhan Kabupaten Penajam Paser Utara dan memiliki rencana fungsi wilayah sebagai wilayah pemerintahan, pertanian, pekebunan, perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan, IKM danpariwisata.

Berdasarkan pola pengelompokan perekonomian dan dominasi kegiatanya dalam system perwilayahan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana rencana pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara dimana Kecamatan Penajam merupakan salah satu Wilayah yang masuk dalam rencana pengembangan wilayah pesisir yang secara khusus akan menjadi sentra pengembangan budidaya perikanan dan sektorpertanian.

Berdasarkan pada rencana pengelompokan perekonomian tersebutdalam system perwilayahan Kabupaten Penajam SPaser Utara maka akan terjadi pemusatan pertumbuhan di sekitar timur atau wilayah pesisirsaja

Berdasarkan kondisi tersebut perlu adanya upaya untuk menyeimbangkan pertumbuhan dengan mengembangkan wilayah barat Kecamatan Penajam yang selamaini di dominasi oleh sector pertanian dan perkebunan.

Perencanaan tataruang yang di muat dalam dokumen RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara yang mengatur arahan pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara menempatkan wilayah Kecamatan Penajam menjadi penting di masa yang akan datang.

Pengembangan wilayah pesisir pantai akan berdampak pada peningkatan pola penggunaan lahan dan perkembangan kegiatan atau aktifitas di wilayah Kecamatan Penajam.

Meningkatnya intensitas penggunaan lahan dana ktifitaslainya akan meningkatkan aktifitas perekonomian hal ini harus di antisipasi dan di kendalikan lebih awal agar tidak berkembang secara tidak beraturan dan tidak sesuai dengan dokumen tataruang yang di atur dalam dokumen peraturan RTRW.

## 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan telaahan dari berbagai dokumen, perencanaan yang ada baik dokumen evaluasi pelaksanaan pembangunan Kecamatan, dokumen RPJM Kabupaten, dokumen RTRW dandokumenlainnya. Maka isustrategis Kecamatan Penajam mengakselerasi pembangun Kecamatan Penajam kedepan adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang tersedia
2. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan bidang studinya
3. Belum optimalnya koordinasi KecamatanPenajam baik internal maupun eksternal
4. Terbatasnya sarana dan prasarana Kantor
5. Penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan melalui pembangunan kawasan desa dan kelurahan
6. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasisi teknologi informasi

7. Peningkatankualitas SDM aparatur
8. Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama serta peningkatan spiritualisme masyarakat melalui peningkatan iman dan taqwa

Berbagai isu strategis tersebut, sangat diperlukan didalam merumuskankebijakan perencanaan pembangunan di daerah, terutama didalam merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang diinginkan lima tahun kedepan.

# BAB IV
# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

## 4. 1. Visi dan Misi Kecamatan Penajam

### 4.1.1. VISI

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat ini dengan mengantisipasi perubahan dimasa yang akan datang, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan misi sebagai berikut:

***"Menjadi Penyelenggara Tugas-Tugas Pemerintah Kecamatan yang Profesional dan bertanggung jawab"***

Penjelasan kata kunci "Visi" di atas sebagai berikut:

1. Penyelenggara tugas-tugas Pemerintah Kecamatan adalah perwujudan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemungutan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan kepada seluruh pihak yang berkepentingan baik masyarakat, pengusaha dan lain-lain.
2. Propesional berarti dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut pihak aparat kecamatan harus didukung oleh sumber Daya Aparatur yang memadai.sehingga bisa melayani masyarakat dengan baik sesuai keahlian masing-masing.
3. Bertanggung jawab adalah kondisi yang diinginkan agar kepemerintahan bisa berjalan dengan baik, lebih berdaya guna,berhasil berguna dan bertanggung jawab yang indikatornya bisa dilihat dari mutu pelayanan yang meningkat, pertanggungjawaban pemerintah lebih tepat, jelas dan terukur serta legtimate.

Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara menyadari bahwa kedepan dengan pernyataan visi tersebut, diperlukan langkah dan strategi antisipatif dan inovatif untuk mewujutkannya.Visi tersebut juga menunjukkan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Penetapan visi tersebut juga merupakan motivasi utama bagi Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara bersama-sama pihak kepentingan lainnya untuk menentukan kearah mana Kecamatan Penajam

Kabupaten Penajam Paser Utara akan dibawa dan sekligus merupakan konsensus bersama dalam upaya merefleksikan tujuan yang akan dicapai dalam jangka panjang.

Berdasarkan penjelasan diatas, jelas terlihat keinginan yang kuat dari Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dalam rangka **Menjadi Penyelenggara Tugas-tugas Pemerintahan Kecamatan yang Profesional dan Bertanggung jawab**. visi tersebut juga sangat mendukung keberhasilan pencapaian visi pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara ***"Mewujudkan masyarakat kabupaten Penajam Paser Utara yang Sejahtera, Berkualitas, Mandiri dalam kehidupan damai, Berkeadilan dan Agamis."*** hubungan tersebut dapat dilihat dari dukungan pelayanan Administrasi Pemerintahan Kecamatan yang propesional dan bertanggung jawab oleh Kecamatan Penajam yang tentunya sangat berharga dalam percepatan pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Lebih jelasnya keterkaitan visi Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan visi instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

**Gambar 6 :**
**Keterkaitan Visi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Dengan Instansi di bawahnya**

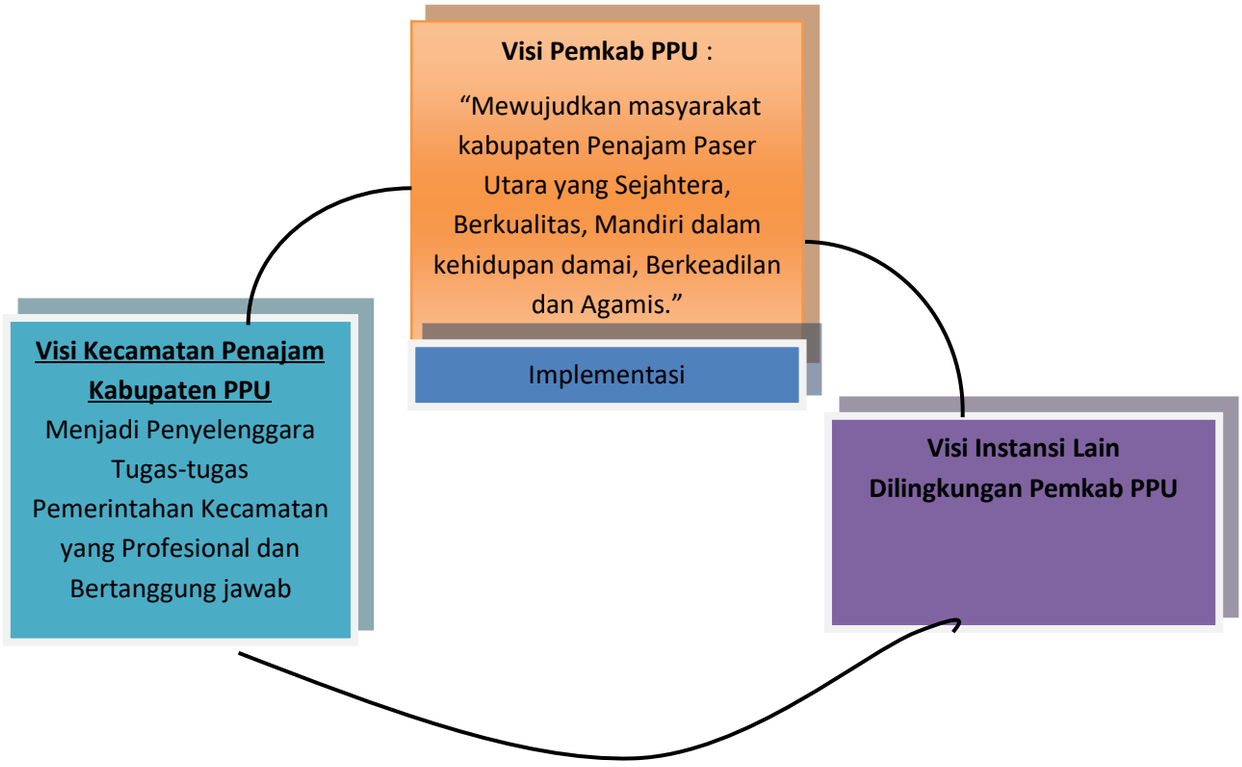

### 4.1.2. MISI

Misi adalah merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh jajaran organisasi dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui keberadaan dan peran dari Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan, kapan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya.

Perumusan misi organisasi harus memperhatikan dan menampung masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (stake holder) dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan.

**Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan misi sebagai berikut :**

1. **Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia**
2. **Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat**
3. **Meningkatkan kerjasama dan koordinasi pelaksanaan tugas pembangun**
4. **Meningkatkan pembinaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan**

**MISI I : Meningkatkan kualitas SDM**

Salah satu diantara tiga kebijakan Pemerintah Propinsi dan juga Kebijakan utama yang akan diterapkan Kecamatan Penajam KabupatenPenajam Paser Utara adalah peningkatan kualitas SDM, hal ini sangat penting dalam rangka meningkatkan kompetisi dan produktivitas masyarakat yang sebelum berlangsung otonomi daerah sangat ketinggalan dibandingkan dengan daerah-daerah lain.Peningkatan kualitas SDM merupakan inventaris yang tak ternilai harganya dan sangat berperan dalam kelangsungan kemajuan Kabupaten Penajam Peser Utara khususnya dan Kalimantan Timur pada umumnya dimasa yang akan datang.

Apabila dihubungkan dengan teori ***Balanced Scorecard*** dalam Menejemen Strategis, misi ini masuk dalam persepektif inovasi dan pembelajaran. Dengan pespektif ini, organisasi akan menjawab pertanyaan bagaimana organisasi dapat mempertahankan dan meningkatkan dalam menghadapi tantangan perubahan.

**MISI II : Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat**

Globalisasi, reformasi dan perubahan paradigma merupakan tantangan yang mendorong perubahan pemerintah kearah yng lebih baik yaitu good governance,guna memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan dan pemerintahan yang lebih baik dari penyelenggara pemerintah.Trerselenggaranya good governance merupakan

persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi dan cita-cita masyarakat. Dalam mewujudkan cita-cita dan aspirasi tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban dan pelayanan yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Salah satu hal yang mendapat sorotan utama dalam dalam penilaian kinerja suatu Instansi Pemerintah diatas, adalah sejauh mana instansi pemerintah telah memberikan pelayanan kepada pihak berkepentingan yang dalam hal ini adalah masyarakat yang menggunakan jasa instansi yang bersangkutan dan apakah pelayanan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan serta sejauhmana pandangan masyarakat atas yang telah diberikan instansi tersebut selama ini.

Dalam perspektif *Balanced Scorecard* misi tersebut termasuk dalam *perspektif internal*. Perspektif internal organisasi akan menjawab pertanyaan " untuk dapat memenuhi kegiatan masyarakat, proses kegiatan internal apa yang harus kita perbaiki dan tingkatkan"

**MISI III : Meningkatkan kerjasama dan koordinasi pelaksanaan tugas pembangunan**

Keberhasilan pembangunan disuatu daerah bukan hanya tanggung jawab dari Pemerintah Kecamatan saja, tetapi juga harus didukung oleh peran serta masyarakat maupun pihak berkepentingan lainnya, karena tanpa ada dukungan tersebut keberhasilan pembangunan disuatu daerah akan sulit untuk diwujudkan. Untuk itu diperlukan kerjasama dan koordinasi pelaksanaan tugas pembangunan dengan pihak-pihak terkait.

Dalam perspektif *Balanced Scorecard* misi tersebut termasuk dalam *perspektif stakeholders.* Dengan perspektif stakeholder, organisasi akan menjawab pertanyaan manfaat apa yang dapat diberikan untuk masyarakat dari hasil kegiatan organisasi.

**MISI IV : Meningkatkan Pembinaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan**

Salah satu tugas pokok dari Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara adalah melakukan pembinaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan agar kegiatan pemerintahan di kelurahan maupun kegiatan pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Penajam bisa berhasil guna dan berdaya guna.

## 4.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan juga merupakan seatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil
2. Jangkauan kedepan, yaitu dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh organisasi.
3. Abstrak, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang
4. Konsisten, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tupoksi organisasi.

Sasaran sebagai berikut

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan desa
2. Mewujudkan penataan yang ruang yang berkesesuaian dengan RTRW
3. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahanyang baik
4. Meningkatnya pembinaan dan penelitian prestasi dalam kegiatan keagamaan

Untuk tercapainya tujuan yang telah diuraikan di atas,maka sasaran dan tujuan dapat dilihat pada Tabel 4.2.

**Tabel 4.2**
**Tujuan dan Sasaran**

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatkantata kelola dan pelayanan Pemerintahan Kecamatan Penajam yang Baik | Meningkatnya kualitastata kelola dan layanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | 85 | 85 | 85 |

# BAB V
# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif yang diwujudkan dalam kebijakandan program secara lengkap.strategi dan Kebijakan Kecamatan Penajam.

Sedangkan kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau mewujudkan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu strategi dan kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Selama Tiga tahun kedepan Kecamatan Penajam melaksanakan 5 program kegiatan yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

5 program tersebut terdiri atas 10 kegiatan dengan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) nya masing-masing yang diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Kecamatan Penajam lima tahun kedepan.

**Tabel 5.1**

**Tujuan, Sasaran, Startegi, dan Kebijakan**

| VISI : Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara Yang Maju, Modern dan Religius | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Misi 6 : Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan | | | | |
| TUJUAN | SASARAN | Indikator Sasaran | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| Meningkatkan tatakelola dan pelayanan Pemerintahan Kecamatan Penajam yang baik | Meningkatnyakualitas tata kelola dan layanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi | Membangun standarisasi kualitas layanan dan menjamin peningkatan pelayanan |
| | | | Meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas | Memberikan pengetahuan, bimbingan atau sosialisasi kepada masyarakat melalui pemberdayaan sesuai ketrampilan yang dimiliki |
| | | | Mengusulkan program dan kegiatan kepada dinas terkait melalui Musrenbang di tingkat Kecamatan | Mendorong peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial |
| | | | Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan | Melakukan monitoring dan evaluasi penegakan peraturan |
| | | | Menciptkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang lebih berkualitas | Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan di kecamatan |

# BAB VI

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk Kecamatan Penajam akan melaksanakan Program dan kegiatan sebagaimana pada Tabel 6.1 yang telah dilengkapi dengan indikator kinerja serta pendanaan indikatif.

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**

**Kab. Penajam Paser Utara Tahun Periode 2024 sd 2026**

**Sub Tahap Rancangan Akhi**

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | TARGET | ANGGARAN | TARGET | ANGGARAN | TARGET | ANGGARAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | 12 bulan | **21,912,211,980.00** | 12 bulan | 21,912,211,980.00 | 12 bulan | 21,912,211,980.00 | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***IKM Kecamatan Penajam*** | **A Predikat** | **B Predikat** | **21,282,211,980.00** | B Predikat | 21,282,211,980.00 | B Predikat | 21,282,211,980.00 | |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Orang yang menerima Gaji,Tunjangan dan Honorarium dan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | 12 Orang/bulan | 12 Orang/bulan | 19,239,106,468.00 | 12 Orang/bulan | 19,239,106,468.00 | 12 Orang/bulan | 19,239,106,468.00 | KECAMATAN PENAJAM |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 14 Orang/bulan | 14 Orang/bulan | 18,911,902,468.00 | 14 Orang/bulan | 18,911,902,468 | 14 Orang/bulan | 18911902468 | KECAMATAN PENAJAM |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 195,600,000.00 | 12 Dokumen | 195,600,000 | 12 Dokumen | 195600000 | KECAMATAN PENAJAM |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD* | 4 Laporan | 8 Laporan | 131,604,000.00 | 8 Laporan | 131,604,000 | 8 Laporan | 131604000 | KECAMATAN PENAJAM |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | - | 236,821,170.00 | - | 236,821,170 | - | 236821170 | KECAMATAN PENAJAM |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | 71 Paket | 25,520,000.00 | 71 Paket | 25,520,000 | 71 Paket | 25520000 | KECAMATAN PENAJAM |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | 12 Paket | 68,536,410.00 | 12 Paket | 68,536,410 | 12 Paket | 68536410 | KECAMATAN PENAJAM |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | 251 Laporan | 142,764,760.00 | 251 Laporan | 142,764,760 | 251 Laporan | 142764760 | KECAMATAN PENAJAM |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 225 Orang/bulan | - | 1,596,623,142.00 | - | 1,596,623,142 | - | 1596623142 | KECAMATAN PENAJAM |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | 12 Laporan | 90,192,000.00 | 12 Laporan | 90,192,000 | 12 Laporan | 90192000 | KECAMATAN PENAJAM |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | 33 Laporan | 34 Laporan | 1,506,431,142.00 | 34 Laporan | 1,506,431,142 | 34 Laporan | 1506431142 | KECAMATAN PENAJAM |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 12 Unit | - | 209,661,200.00 | - | 209,661,200 | - | 209661200 | KECAMATAN PENAJAM |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | 9 Unit | 12 Unit | 126,247,100.00 | 12 Unit | 126,247,100 | 12 Unit | 126247100 | KECAMATAN PENAJAM |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 71 Unit | 71 Unit | 36,872,100.00 | 71 Unit | 36,872,100 | 71 Unit | 36872100 | KECAMATAN PENAJAM |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 2 Unit | 2 Unit | 46,542,000.00 | 2 Unit | 46,542,000 | 2 Unit | 46542000 | KECAMATAN PENAJAM |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | ***Rata - rata capaian IKM kelurahan*** | **A Predikat** | **B Predikat** | **50,000,000.00** | B Predikat | 50,000,000 | B Predikat | 50000000 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | - | 50,000,000.00 | - | 50,000,000 | - | 50000000 | KECAMATAN PENAJAM |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait* | | 23 Laporan | 50,000,000.00 | 23 Laporan | 50,000,000 | 23 Laporan | 50000000 | KECAMATAN PENAJAM |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***persentase jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina*** | **95 persen** | **85 persen** | **100,000,000.00** | 85 persen | 100,000,000 | 85 persen | 100000000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | *Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing* | 23 Pokmas / Ormas | 23 Pokmas / Ormas | 100,000,000.00 | 23 Pokmas / Ormas | 100,000,000 | 23 Pokmas / Ormas | 100000000 | KECAMATAN PENAJAM |
| | 7.01.03.2.06.0006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing* | 115 Keluarga | 69 Keluarga | 50,000,000.00 | 69 Keluarga | 50,000,000 | 69 Keluarga | 50000000 | KECAMATAN PENAJAM |
| | 7.01.03.2.06.0007 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat* | 115 Keluarga | 69 Keluarga | 50,000,000.00 | 69 Keluarga | 50,000,000 | 69 Keluarga | 50000000 | KECAMATAN PENAJAM |
| 4. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | ***fasilitasi pelaksanaan agenda nasional*** | **391 Orang 100 persen** | **100 persen** | **250,000,000.00** | 100 persen | 250,000,000 | 100 persen | 250000000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku,Umat Beragama,Ras,dan golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keagamaan lokal,Regional dan Nasional* | 391 Orang | 391 Orang | 250,000,000.00 | 391 Orang | 250,000,000 | 391 Orang | 250000000 | KECAMATAN PENAJAM |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | 172 Orang | 250,000,000.00 | 172 Orang | 250,000,000 | 172 Orang | 250000000 | KECAMATAN PENAJAM |
| 5. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | ***persentase usulan pemekaran desa yang difasilitasi dan persentase desa yang tertib Administrasi pengelolaan keuangan desa*** | **100 persen** | **75 persen** | **230,000,000.00** | 75 persen | 230,000,000 | 75 persen | 230000000 | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa* | 16 Dokumen | 16 Dokumen | 230,000,000.00 | 16 Dokumen | 230,000,000 | 16 Dokumen | 230000000 | KECAMATAN PENAJAM |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | 5 Dokumen | 4 Dokumen | 50,000,000.00 | 4 Dokumen | 50,000,000 | 4 Dokumen | 50000000 | KECAMATAN PENAJAM |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | 16 Dokumen | 4 Dokumen | 30,000,000.00 | 4 Dokumen | 30,000,000 | 4 Dokumen | 30000000 | KECAMATAN PENAJAM |
| | 7.01.06.2.01.001 1 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | |
| | | | *0* | | 0 0 | 0.00 | 0 0 | - | 0 0 | 0 | KECAMATAN PENAJAM |
| | 7.01.06.2.01.001 5 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa* | 8 Dokumen | 7 Dokumen | 150,000,000.00 | 7 Dokumen | 150,000,000 | 7 Dokumen | 150000000 | KECAMATAN PENAJAM |
| | | **KELURAHAN PENAJAM** | | | | **2,429,070,000.00** | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | **2,429,070,000.00** | | | | | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | **2,429,070,000.00** | | | | | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | ***Rata - rata capaian IKM kelurahan*** | **A Predikat** | **B Predikat** | **889,070,000.00** | B Predikat | 889,070,000 | B Predikat | 889070000 | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 12 Laporan | 12 Laporan | 889,070,000.00 | 12 Laporan | 889,070,000 | 12 Laporan | 889070000 | KELURAHAN PENAJAM |
| | 7.01.02.2.02.000 3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 19 Laporan | 14 Laporan | 889,070,000.00 | 14 Laporan | 889,070,000 | 14 Laporan | 889070000 | KELURAHAN PENAJAM |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***persentase jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina*** | **95 persen** | **85 persen** | **1,540,000,000.00** | 85 persen | 1,540,000,000 | 85 persen | 1540000000 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 23 Pokmas / Ormas | 23 Pokmas / Ormas | 1,540,000,000.00 | 23 Pokmas / Ormas | 1,540,000,000 | 23 Pokmas / Ormas | 1540000000 | KELURAHAN PENAJAM |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 57 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 1,540,000,000.00 | 5 Pokmas / Ormas | 1,540,000,000 | 5 Pokmas / Ormas | 1540000000 | KELURAHAN PENAJAM |
| | | **KELURAHAN GUNUNG SETELENG** | | | | **1,351,980,000.00** | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | **1,351,980,000.00** | | | | | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | **1,351,980,000.00** | | | | | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | ***Rata - rata capaian IKM kelurahan*** | **A Predikat** | **B Predikat** | **603,980,000.00** | | | | | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 12 Laporan | 12 Laporan | 603,980,000.00 | 12 Laporan | 603,980,000 | 12 Laporan | 603980000 | KELURAHAN GUNUNG SETELENG |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 19 Laporan | 12 Laporan | 603,980,000.00 | 12 Laporan | 603,980,000 | 12 Laporan | 603980000 | KELURAHAN GUNUNG SETELENG |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***persentase jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina*** | **95 persen** | **85 persen** | **748,000,000.00** | | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 23 Pokmas / Ormas | 23 Pokmas / Ormas | 748,000,000.00 | 23 Pokmas / Ormas | 748,000,000 | 23 Pokmas / Ormas | 748000000 | KELURAHAN GUNUNG SETELENG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 57 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 748,000,000.00 | 5 Pokmas / Ormas | 748,000,000 | 5 Pokmas / Ormas | 748000000 | KELURAHAN GUNUNG SETELENG |
| | | **KELURAHAN NENANG** | | | | **1,237,750,000.00** | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | **1,237,750,000.00** | | | | | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | **1,237,750,000.00** | | | | | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | ***Rata - rata capaian IKM kelurahan*** | **A Predikat** | **B Predikat** | **554,550,000.00** | | | | | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 12 Laporan | 12 Laporan | 554,550,000.00 | 12 Laporan | 554,550,000 | 12 Laporan | 554550000 | KELURAHAN NENANG |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 19 Laporan | 12 Laporan | 554,550,000.00 | 12 Laporan | 554,550,000 | 12 Laporan | 554550000 | KELURAHAN NENANG |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***persentase jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina*** | **95 persen** | **85 persen** | **683,200,000.00** | | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 23 Pokmas / Ormas | 23 Pokmas / Ormas | 683,200,000.00 | 23 Pokmas / Ormas | 683,200,000 | 23 Pokmas / Ormas | 683200000 | KELURAHAN NENANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 57 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 683,200,000.00 | 5 Pokmas / Ormas | 683,200,000 | 5 Pokmas / Ormas | 683200000 | KELURAHAN NENANG |
| | | **KELURAHAN NIPAH-NIPAH** | | | | **1,242,860,000.00** | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | **1,242,860,000.00** | | | | | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | **1,242,860,000.00** | | | | | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | ***Rata - rata capaian IKM kelurahan*** | **A Predikat** | **B Predikat** | **756,460,000.00** | | | | | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 12 Laporan | 12 Laporan | 756,460,000.00 | 12 Laporan | 756,460,000 | 12 Laporan | 756460000 | KELURAHAN NIPAH-NIPAH |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 19 Laporan | 12 Laporan | 756,460,000.00 | 12 Laporan | 756,460,000 | 12 Laporan | 756460000 | KELURAHAN NIPAH-NIPAH |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***persentase jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina*** | **95 persen** | **85 persen** | **486,400,000.00** | | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 23 Pokmas / Ormas | 23 Pokmas / Ormas | 486,400,000.00 | 23 Pokmas / Ormas | 486,400,000 | 23 Pokmas / Ormas | 486400000 | KELURAHAN NIPAH-NIPAH |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 57 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 486,400,000.00 | 5 Pokmas / Ormas | 486,400,000 | 5 Pokmas / Ormas | 486400000 | KELURAHAN NIPAH-NIPAH |
| | | **KELURAHAN LAWE-LAWE** | | | | **1,017,280,000.00** | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | **1,017,280,000.00** | | | | | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | **1,017,280,000.00** | | | | | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | ***Rata - rata capaian IKM kelurahan*** | **A Predikat** | **B Predikat** | **550,080,000.00** | | | | | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 12 Laporan | 12 Laporan | 550,080,000.00 | 12 Laporan | 550,080,000 | 12 Laporan | 550080000 | KELURAHAN LAWE-LAWE |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 19 Laporan | 12 Laporan | 550,080,000.00 | 12 Laporan | 550,080,000 | 12 Laporan | 550080000 | KELURAHAN LAWE-LAWE |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***persentase jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina*** | **95 persen** | **85 persen** | **467,200,000.00** | | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 23 Pokmas / Ormas | 23 Pokmas / Ormas | 467,200,000.00 | 23 Pokmas / Ormas | 467,200,000 | 23 Pokmas / Ormas | 467200000 | KELURAHAN LAWE-LAWE |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 57 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 467,200,000.00 | 5 Pokmas / Ormas | 467,200,000 | 5 Pokmas / Ormas | 467200000 | KELURAHAN LAWE-LAWE |
| | | **KELURAHAN PETUNG** | | | | **1,455,180,000.00** | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | **1,455,180,000.00** | | | | | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | **1,455,180,000.00** | | | | | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | ***Rata - rata capaian IKM kelurahan*** | **A Predikat** | **B Predikat** | **505,580,000.00** | | | | | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 12 Laporan | 12 Laporan | 505,580,000.00 | 12 Laporan | 505,580,000 | 12 Laporan | 505580000 | KELURAHAN PETUNG |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 19 Laporan | 12 Laporan | 505,580,000.00 | 12 Laporan | 505,580,000 | 12 Laporan | 505580000 | KELURAHAN PETUNG |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***persentase jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina*** | **95 persen** | **85 persen** | **949,600,000.00** | | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 23 Pokmas / Ormas | 23 Pokmas / Ormas | 949,600,000.00 | 23 Pokmas / Ormas | 949,600,000 | 23 Pokmas / Ormas | 949600000 | KELURAHAN PETUNG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 57 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 949,600,000.00 | 5 Pokmas / Ormas | 949,600,000 | 5 Pokmas / Ormas | 949600000 | KELURAHAN PETUNG |
| | | **KELURAHAN TANJUNG TENGAH** | | | | **988,930,000.00** | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | **988,930,000.00** | | | | | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | **988,930,000.00** | | | | | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | ***Rata - rata capaian IKM kelurahan*** | **A Predikat** | **B Predikat** | **495,330,000.00** | | | | | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 12 Laporan | 12 Laporan | 495,330,000.00 | 12 Laporan | 495,330,000 | 12 Laporan | 495330000 | KELURAHAN TANJUNG TENGAH |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 19 Laporan | 12 Laporan | 495,330,000.00 | 12 Laporan | 495,330,000 | 12 Laporan | 495330000 | KELURAHAN TANJUNG TENGAH |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***persentase jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina*** | **95 persen** | **85 persen** | **493,600,000.00** | | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 23 Pokmas / Ormas | 23 Pokmas / Ormas | 493,600,000.00 | 23 Pokmas / Ormas | 493,600,000 | 23 Pokmas / Ormas | 493600000 | KELURAHAN TANJUNG TENGAH |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 57 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 493,600,000.00 | 5 Pokmas / Ormas | 493,600,000 | 5 Pokmas / Ormas | 493600000 | KELURAHAN TANJUNG TENGAH |
| | | **KELURAHAN KAMPUNG BARU** | | | | **765,730,000.00** | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | **765,730,000.00** | | | | | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | **765,730,000.00** | | | | | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | ***Rata - rata capaian IKM kelurahan*** | **A Predikat** | **B Predikat** | **461,730,000.00** | | | | | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 12 Laporan | 12 Laporan | 461,730,000.00 | 12 Laporan | 461,730,000 | 12 Laporan | 461730000 | KELURAHAN KAMPUNG BARU |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 19 Laporan | 12 Laporan | 461,730,000.00 | 12 Laporan | 461,730,000 | 12 Laporan | 461730000 | KELURAHAN KAMPUNG BARU |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***persentase jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina*** | **95 persen** | **85 persen** | **304,000,000.00** | | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 23 Pokmas / Ormas | 23 Pokmas / Ormas | 304,000,000.00 | 23 Pokmas / Ormas | 304,000,000 | 23 Pokmas / Ormas | 304000000 | KELURAHAN KAMPUNG BARU |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 57 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 304,000,000.00 | 5 Pokmas / Ormas | 304,000,000 | 5 Pokmas / Ormas | 304000000 | KELURAHAN KAMPUNG BARU |
| | | **KELURAHAN SALOLOANG** | | | | **1,020,730,000.00** | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | **1,020,730,000.00** | | | | | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | **1,020,730,000.00** | | | | | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | ***Rata - rata capaian IKM kelurahan*** | **A Predikat** | **B Predikat** | **572,730,000.00** | | | | | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 12 Laporan | 12 Laporan | 572,730,000.00 | 12 Laporan | 572,730,000 | 12 Laporan | 572730000 | KELURAHAN SALOLOANG |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 19 Laporan | 12 Laporan | 572,730,000.00 | 12 Laporan | 572,730,000 | 12 Laporan | 572730000 | KELURAHAN SALOLOANG |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***persentase jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina*** | **95 persen** | **85 persen** | **448,000,000.00** | | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 23 Pokmas / Ormas | 23 Pokmas / Ormas | 448,000,000.00 | 23 Pokmas / Ormas | 448,000,000 | 23 Pokmas / Ormas | 448000000 | KELURAHAN SALOLOANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 57 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 448,000,000.00 | 5 Pokmas / Ormas | 448,000,000 | 5 Pokmas / Ormas | 448000000 | KELURAHAN SALOLOANG |
| | | **KELURAHAN PEJALA** | | | | **888,580,000.00** | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | **888,580,000.00** | | | | | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | **888,580,000.00** | | | | | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | ***Rata - rata capaian IKM kelurahan*** | **A Predikat** | **B Predikat** | **524,580,000.00** | | | | | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 12 Laporan | 12 Laporan | 524,580,000.00 | 12 Laporan | 524,580,000 | 12 Laporan | 524580000 | KELURAHAN PEJALA |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 19 Laporan | 12 Laporan | 524,580,000.00 | 12 Laporan | 524,580,000 | 12 Laporan | 524580000 | KELURAHAN PEJALA |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***persentase jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina*** | **95 persen** | **85 persen** | **364,000,000.00** | | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 23 Pokmas / Ormas | 23 Pokmas / Ormas | 364,000,000.00 | 23 Pokmas / Ormas | 364,000,000 | 23 Pokmas / Ormas | 364000000 | KELURAHAN PEJALA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 57 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 364,000,000.00 | 5 Pokmas / Ormas | 364,000,000 | 5 Pokmas / Ormas | 364000000 | KELURAHAN PEJALA |
| | | **KELURAHAN SESUMPU** | | | | **798,380,000.00** | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | **798,380,000.00** | | | | | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | **798,380,000.00** | | | | | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | ***Rata - rata capaian IKM kelurahan*** | **A Predikat** | **B Predikat** | **473,380,000.00** | | | | | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 12 Laporan | 12 Laporan | 473,380,000.00 | 12 Laporan | 473,380,000 | 12 Laporan | 473380000 | KELURAHAN SESUMPU |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 19 Laporan | 12 Laporan | 473,380,000.00 | 12 Laporan | 473,380,000 | 12 Laporan | 473380000 | KELURAHAN SESUMPU |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***persentase jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina*** | **95 persen** | **85 persen** | **325,000,000.00** | | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 23 Pokmas / Ormas | 23 Pokmas / Ormas | 325,000,000.00 | 23 Pokmas / Ormas | 325,000,000 | 23 Pokmas / Ormas | 325000000 | KELURAHAN SESUMPU |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 57 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 325,000,000.00 | 5 Pokmas / Ormas | 325,000,000 | 5 Pokmas / Ormas | 325000000 | KELURAHAN SESUMPU |
| | | **KELURAHAN SUANGAI PARIT** | | | | **1,394,330,000.00** | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | **1,394,330,000.00** | | | | | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | **1,394,330,000.00** | | | | | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | ***Rata - rata capaian IKM kelurahan*** | **A Predikat** | **B Predikat** | **886,330,000.00** | | | | | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 12 Laporan | 12 Laporan | 886,330,000.00 | 12 Laporan | 886,330,000 | 12 Laporan | 886330000 | KELURAHAN SUANGAI PARIT |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 19 Laporan | 12 Laporan | 886,330,000.00 | 12 Laporan | 886,330,000 | 12 Laporan | 886330000 | KELURAHAN SUANGAI PARIT |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***persentase jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina*** | **95 persen** | **85 persen** | **508,000,000.00** | | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 23 Pokmas / Ormas | 23 Pokmas / Ormas | 508,000,000.00 | 23 Pokmas / Ormas | 508,000,000 | 23 Pokmas / Ormas | 508000000 | KELURAHAN SUANGAI PARIT |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 57 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 508,000,000.00 | 5 Pokmas / Ormas | 508,000,000 | 5 Pokmas / Ormas | 508000000 | KELURAHAN SUANGAI PARIT |
| | | **KELURAHAN SOTEK** | | | | **1,159,380,000.00** | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | **1,159,380,000.00** | | | | | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | **1,159,380,000.00** | | | | | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | ***Rata - rata capaian IKM kelurahan*** | **A Predikat** | **B Predikat** | **525,380,000.00** | | | | | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 12 Laporan | 12 Laporan | 525,380,000.00 | 12 Laporan | 525,380,000 | 12 Laporan | 525380000 | KELURAHAN SOTEK |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 19 Laporan | 12 Laporan | 525,380,000.00 | 12 Laporan | 525,380,000 | 12 Laporan | 525380000 | KELURAHAN SOTEK |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***persentase jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina*** | **95 persen** | **85 persen** | **634,000,000.00** | | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 23 Pokmas / Ormas | 23 Pokmas / Ormas | 634,000,000.00 | 23 Pokmas / Ormas | 634,000,000 | 23 Pokmas / Ormas | 634000000 | KELURAHAN SOTEK |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 57 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 634,000,000.00 | 5 Pokmas / Ormas | 634,000,000 | 5 Pokmas / Ormas | 634000000 | KELURAHAN SOTEK |
| | | **KELURAHAN RIKO** | | | | **905,380,000.00** | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | **905,380,000.00** | | | | | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | **905,380,000.00** | | | | | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | ***Rata - rata capaian IKM kelurahan*** | **A Predikat** | **B Predikat** | **548,580,000.00** | | | | | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 12 Laporan | 12 Laporan | 548,580,000.00 | 12 Laporan | 548,580,000 | 12 Laporan | 548580000 | KELURAHAN RIKO |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 19 Laporan | 12 Laporan | 548,580,000.00 | 12 Laporan | 548,580,000 | 12 Laporan | 548580000 | KELURAHAN RIKO |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***persentase jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina*** | **95 persen** | **85 persen** | **356,800,000.00** | | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 23 Pokmas / Ormas | 23 Pokmas / Ormas | 356,800,000.00 | 23 Pokmas / Ormas | 356,800,000 | 23 Pokmas / Ormas | 356800000 | KELURAHAN RIKO |
| | 7.01.03.2.02.0003 | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 57 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 356,800,000.00 | 5 Pokmas / Ormas | 356,800,000 | 5 Pokmas / Ormas | 356800000 | KELURAHAN RIKO |
| | | **KELURAHAN BULUMINUNG** | | | | **970,580,000.00** | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | **970,580,000.00** | | | | | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | **970,580,000.00** | | | | | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | ***Rata - rata capaian IKM kelurahan*** | **A Predikat** | **B Predikat** | **551,380,000.00** | | | | | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 12 Laporan | 12 Laporan | 551,380,000.00 | 12 Laporan | 551,380,000 | 12 Laporan | 551380000 | KELURAHAN BULUMINUNG |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 19 Laporan | 12 Laporan | 551,380,000.00 | 12 Laporan | 551,380,000 | 12 Laporan | 551380000 | KELURAHAN BULUMINUNG |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***persentase jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina*** | **95 persen** | **85 persen** | **419,200,000.00** | | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 23 Pokmas / Ormas | 23 Pokmas / Ormas | 419,200,000.00 | 23 Pokmas / Ormas | 419,200,000 | 23 Pokmas / Ormas | 419200000 | KELURAHAN BULUMINUNG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 57 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 419,200,000.00 | 5 Pokmas / Ormas | 419,200,000 | 5 Pokmas / Ormas | 419200000 | KELURAHAN BULUMINUNG |
| | | **KELURAHAN SEPAN** | | | | **895,580,000.00** | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | **895,580,000.00** | | | | | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | **895,580,000.00** | | | | | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | ***Rata - rata capaian IKM kelurahan*** | **A Predikat** | **B Predikat** | **488,380,000.00** | | | | | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 12 Laporan | 12 Laporan | 488,380,000.00 | 12 Laporan | 488,380,000 | 12 Laporan | 488380000 | KELURAHAN SEPAN |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 19 Laporan | 12 Laporan | 488,380,000.00 | 12 Laporan | 488,380,000 | 12 Laporan | 488380000 | KELURAHAN SEPAN |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***persentase jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina*** | **95 persen** | **85 persen** | **407,200,000.00** | | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 23 Pokmas / Ormas | 23 Pokmas / Ormas | 407,200,000.00 | 23 Pokmas / Ormas | 407,200,000 | 23 Pokmas / Ormas | 407200000 | KELURAHAN SEPAN |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 57 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 407,200,000.00 | 5 Pokmas / Ormas | 407,200,000 | 5 Pokmas / Ormas | 407200000 | KELURAHAN SEPAN |
| | | **KELURAHAN GERSIK** | | | | **1,294,580,000.00** | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | **1,294,580,000.00** | | | | | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | **1,294,580,000.00** | | | | | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | ***Rata - rata capaian IKM kelurahan*** | **A Predikat** | **B Predikat** | **697,780,000.00** | | | | | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 12 Laporan | 12 Laporan | 697,780,000.00 | 12 Laporan | 697,780,000 | 12 Laporan | 697780000 | KELURAHAN GERSIK |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 19 Laporan | 12 Laporan | 697,780,000.00 | 12 Laporan | 697,780,000 | 12 Laporan | 697780000 | KELURAHAN GERSIK |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***persentase jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina*** | **95 persen** | **85 persen** | **596,800,000.00** | | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 23 Pokmas / Ormas | 23 Pokmas / Ormas | 596,800,000.00 | 23 Pokmas / Ormas | 596,800,000 | 23 Pokmas / Ormas | 596800000 | KELURAHAN GERSIK |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 57 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 596,800,000.00 | 5 Pokmas / Ormas | 596,800,000 | 5 Pokmas / Ormas | 596800000 | KELURAHAN GERSIK |
| | | **KELURAHAN PANTAI LANGO** | | | | **976,780,000.00** | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | **976,780,000.00** | | | | | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | **976,780,000.00** | | | | | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | ***Rata - rata capaian IKM kelurahan*** | **A Predikat** | **B Predikat** | **591,180,000.00** | | | | | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 12 Laporan | 12 Laporan | 591,180,000.00 | 12 Laporan | 591,180,000 | 12 Laporan | 591180000 | KELURAHAN PANTAI LANGO |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 19 Laporan | 12 Laporan | 591,180,000.00 | 12 Laporan | 591,180,000 | 12 Laporan | 591180000 | KELURAHAN PANTAI LANGO |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***persentase jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina*** | **95 persen** | **85 persen** | **385,600,000.00** | | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 23 Pokmas / Ormas | 23 Pokmas / Ormas | 385,600,000.00 | 23 Pokmas / Ormas | 385,600,000 | 23 Pokmas / Ormas | 385600000 | KELURAHAN PANTAI LANGO |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 57 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 385,600,000.00 | 5 Pokmas / Ormas | 385,600,000 | 5 Pokmas / Ormas | 385600000 | KELURAHAN PANTAI LANGO |
| | | **KELURAHAN JENEBORA** | | | | **1,215,580,000.00** | | | | | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | **1,215,580,000.00** | | | | | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | **1,215,580,000.00** | | | | | |
| 1. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | ***Rata - rata capaian IKM kelurahan*** | **A Predikat** | **B Predikat** | **556,380,000.00** | | | | | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 12 Laporan | 12 Laporan | 556,380,000.00 | 12 Laporan | 556,380,000 | 12 Laporan | 556380000 | KELURAHAN JENEBORA |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 19 Laporan | 12 Laporan | 556,380,000.00 | 12 Laporan | 556,380,000 | 12 Laporan | 556380000 | KELURAHAN JENEBORA |
| 2. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***persentase jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina*** | **95 persen** | **85 persen** | **659,200,000.00** | | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 23 Pokmas / Ormas | 23 Pokmas / Ormas | 659,200,000.00 | 23 Pokmas / Ormas | 659,200,000 | 23 Pokmas / Ormas | 659200000 | KELURAHAN JENEBORA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | 57 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 659,200,000.00 | 5 Pokmas / Ormas | 659,200,000 | 5 Pokmas / Ormas | 659200000 | KELURAHAN JENEBORA |
| | **J U M L A H** | | | | | **43,920,871,980.00** | | **43,920,871,980.00** | | **43,920,871,980.00** | |

# BAB VII
# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Kecamatan Penajam yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Penajam dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Kecamatan Penajam yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel berikut.:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Penajam pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| NO | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 0 | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (9) |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyrakat | 85 | 85 | 85 | 85 | |

# BAB VIII

# PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Kecamatan Penajam untuk periode 3 (tiga) tahun.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Kecamatan Penajam dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah dispesifikasikan dan disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Tahun 2024-2026.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam RENSTRA ini adalah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Strategis RPJMN untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Hal strategis yang harus menjadi pedoman dalam komitmen bersama adalah bahwa RENSTRA Kecamatan Penajam ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Penajam.

Karena itu, RENSTRA ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan RKA Kecamatan Penajam serta digunakan sebagai penyusunan rancangan RKPD Kecamatan Penajam.

Harus dipastikan bahwa program kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam RENJA dan RKA Kecamatan Penajam merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Kecamatan Penajam.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RENSTRA Kecamatan Penajam yang telah dijabarkan dalam RENJA dan RKA Kecamatan Penajam harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun laporan kinerja (LKjIP) Kecamatan Penajam. Laporan kinerja (LkjIP) itu menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja Kecamatan Penajam di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk lebih bekerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja RENTRA Kecamatan Penajam.

Camat Penajam

Kahar Mashud, SH
Nip. 19730118 200604 1 003